

ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah tindakan yang mempermalukan, melecehkan tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksetaraan gender. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak. Korban kekerasan seksual perempuan dan anak mengalami penderitaan luar biasa baik secara fisik maupun psikis sehingga mereka wajib dipenuhi hak pemulihannya Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk, kendala, dan upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Semarang dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual perempuan dan anak. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan perolehan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dan bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) bentuk-bentuk hak pemulihan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Semarang antara lain memfasilitasi pemberian layanan medis, layanan pemulihan mental atau psikologis, layanan penguatan psikososial, layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, memfasilitasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, dan mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban serta keluarga korban. 2) Kendala-kendala dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual menurut teori efektivitas hukum yaitu kendala faktor sarana atau fasilitas dan faktor budaya hukum. Kendala dalam faktor sarana atau fasilitas antara lain terbatasnya jumlah tenaga psikolog, masih terbatasnya sarana dan prasarana, dan minimnya dana dari Pemerintah Kota. Sedangkan kendala dalam budaya hukum adalah sifat korban yang tertutup, orang tua anak korban menjadi overprotektif, dan masyarakat yang menyudutkan pihak korban. 3) Upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Semarang dalam mengatasi kendala yang terjadi antara lain bekerja sama dengan mitra di berbagai sektor, melakukan perekutan tenaga psikolog, mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada, merangkul korban agar lebih terbuka, memberikan konseling kepada orang tua terkait pengasuhan, dan melakukan edukasi atau sosialisasi ke lingkungan sekitar korban.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Korban, Hak Pemulihan, Kendala, Upaya

ABSTRACT

Sexual violence is an act that shames, abuses a person's body or reproductive function due to gender inequality. The majority of victims of sexual violence are women and children. Victims of sexual violence against women and children experience tremendous suffering both physically and psychologically so that they must be fulfilled their right to recovery. The purpose of this study is to explain the forms, constraints, and efforts made by UPTD PPA Semarang City in fulfilling the right to recovery of victims of sexual violence against women and children. This type of research is sociological juridical research with data acquisition carried out through interviews with sources and literature materials. The research specifications used are descriptive analysis and the data analysis method used is qualitative data analysis. Based on the results of the study, it is known that 1) the forms of recovery rights provided by UPTD PPA Semarang City include facilitating the provision of medical services, mental or psychological recovery services, psychosocial strengthening services, social rehabilitation services, social empowerment, and social reintegration, facilitating economic empowerment needs, and identifying temporary shelter needs for victims and victims' families. 2) Constraints in The fulfillment of the right to recovery of victims of sexual violence according to the theory of legal effectiveness, namely the constraints of facilities or facilities and legal cultural factors. Constraints in the factors of facilities or facilities include the limited number of psychologists, still limited facilities and infrastructure, and the lack of funding from the City Government. While the obstacles in the legal culture are the closed nature of the victim, the parents of the victim's child become overprotective, and the society that corners the victim. 3) Efforts made by UPTD PPA Semarang City in overcoming obstacles that occur include collaborating with partners in various sectors, recruiting psychologists, optimizing the function of existing facilities and infrastructure, embracing victims to be more open, providing counseling to parents related to caregiving, and conducting education or socialization to the environment around victims.

Keywords : Sexual Violence, Victim, Right to Recovery, Obstacles, Efforts